

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2010-2014**

**SKRIPSI**



Ditulis Oleh :

Nama : Tika Wulan Yuli

No.Mahasiswa : 121213344

Jurusan : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

**2016**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT dan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Aku persembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayahanda Sukanto dan Ibunda Purgiyati tercinta. Terimakasih atas seluruh perjuangan dan pengorbanan serta doa di setiap sujud mereka demi keberhasilan anak-anaknya. Beliau berdua lah yang memotivasiku untuk melakukan segala kebaikan dengan kedisiplinan dan tanggungjawab. Beliau berdua juga yang tak pernah lelah mendidik aku menjadi orang yang baik dan menasehatiku di saat aku berbuat salah.
2. Suamiku, Supto Wantoro. Terimakasih atas segala dukungan dan selalu menemaniku saat pengerjaan skripsi ini.
3. Adikku tersayang, Tisa Aprilia Cerry. Terimakasih atas segala dukungan dan canda tawa yang telah diberikan kepadaku.
4. Anakku, Afkar Nanda YulWantoro. Terimakasih atas keceriaan dan tangisanmu yang selalu membuatku semangat.

## MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujaadilah: 11)

“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya dan beramalah untuk urusan akhiratmu seakan-akan engkau meninggal dunia besok” (HR.Ibnu ‘Asakir)

“Banyak orang yang mengatakan tidak bisa, padahal sesungguhnya tidak mau. Jika mau, apapun bisa” (Mario Teguh)

*“Ketika kamu merasa putus asa dan tidak bersemangat, ingatlah jika masa depan dan kesukseanmu ada ditanganmmu”* (TikaWulanYuli)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat islam, iman dan kesehatan serta mempermudah segala kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi umat islam di seluruh dunia hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini berjudul : *"Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014"* dan disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta selama periode 2010-2014. Data yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Yogyakarta tahun 2010-2014. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta selama periode 2010-2014, data diolah menggunakan Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu terdiri dari Analisis Kinerja Pendapatan, Analisis Kinerja Belanja, Analisis Pembiayaan. Analisis Kinerja Pendapatan meliputi Analisis Varians Anggaran Pendapatan, Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, dan Derajat Kontribusi BUMD. Analisis Kinerja Belanja terdiri dari

Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja, Analisis Efisiensi Belanja.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bpk. Sukanto (Ayah), Ny. Purniyati (Ibu), Bpk. Sapto (Suami), Tisa (Adik kandung), Afkar (Anakkandung) yang sudah mendukung lahir dan batin serta memberikan doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan dan perjuangannya.
2. Moh. Mahsun, SE, M.Si., Akt. CA, CPA selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta atas segenap sarana dan prasarana yang telah bapak dan manajemen usahakan demi kemajuan kampus ini.
3. Drs. Mudasetia Hamid, MM, Akt. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan petunjuk sehingga memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi.
4. Seluruh Dosen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang sudah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Terimakasih atas pendidikan dan pengalaman yang telah Bapak dan Ibu Dosen berikan selama ini.

5. Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Kepala Dinas Perizinan terutama Drs. Hardono beserta staf yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk Sahabatku, Rika Oktavianti. Terimakasih selama ini telah membantuku ketika aku merasa kesulitan dan telah menemaniku mendapatkan data untuk skripsiku. Untuk Rukmini dan Riyantiningsih. Terimakasih atas waktu luangnya mengantarkan ke Kantor Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kenari No.56 Yogyakarta untuk mendapatkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2014.
7. Semuatemana-temanku angkatan 2012, khususnya dari jurusan akuntansi. Terimakasih atas segala kebaikan dan kebersamaan yang sudah kita lalui selama ini. Kuliah bersama, mengerjakan tugas bersama, adu argumen saat presentasi di depan kelas sungguh momen yang tak akan terlupakan. Mewarnai hari menggapai mimpi bersama.
8. Sahabat dan adik-adikku sesama aktivis kampus di LDK Jama'ah An-Nahl, HMJA, Paduan Suara DoReMi, WWEC, BEM dan HMJM. Terimakasih karena telah mengajarkanku banyak hal

tentang kepedulian, cara berorganisasi, dan mengedepankan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri sendiri. Pengabdian kita pada kampus adalah usaha untuk menjadikan ilmu kita bermanfaat dan berkah bagi sesama.

9. Seluruh karyawan dan Takmir masjid STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepadaku selama ada di kampus.
10. Staf perpustakaan STIE Widya Wiwaha, Perpustakaan Kota Yogya yang telah memudahkan penulis dalam mencari dan meminjamkan referensi buku.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moral, spiritual atau pun pengetahuan kepada penulis sejak dari awal kuliah sampai pada saat penulisan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca.

Yogyakarta, 4 Februari 2016

Penulis

**TikaWulanYuli**

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan Skripsi .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iv
Halaman Pengesahan Ujian .....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Motto.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Histogram .....	xvii
Daftar Lampiran .....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Masalah Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	8



BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tinjauan Teoritis.....	10
1. Keuangan Daerah .....	10
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah .....	10
b. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	11
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	12
a. Pengertian APBD .....	12
b. Proses Penyusunan APBD.....	13
c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	19
d. Klasifikasi APBD.....	23
3. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	32
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Konseptual Penelitian.....	42
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 43
A. Metode Penelitian.....	43
B. Objek Penelitian .....	44
C. Jenis Penelitian .....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Analisis Data.....	45

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta.....	52
B. Gambaran Perekonomian dan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.....	61
C. Perhitungandan Analisis KinerjaPengelolaan APBD.....	65
1. Analisis Kinerja Pendapatan .....	65
2. Analisis Kinerja Belanja.....	78
3. AnalisisPembiayaan.....	87
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	 89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal.
Tabel 3.1	Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi .....	46
Tabel 3.2	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan .....	48
Tabel 4.1	PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012.....	63
Tabel 4.2	Laporan Perhitungan Pendapatan .....	66
Tabel 4.3	Pertumbuhan Pendapatan .....	68
Tabel 4.4	Derajat Desentralisasi .....	70
Tabel 4.5	Kemandirian Keuangan .....	72
Tabel 4.6	Efektivitas Pajak Daerah .....	74
Tabel 4.7	Derajat Kontribusi BUMD .....	76
Tabel 4.8	Laporan Perhitungan Belanja .....	78
Tabel 4.9	Pertumbuhan Belanja .....	80
Tabel 4.10	Belanja Operasi dan Belanja Modal .....	82
Tabel 4.11	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung .....	84
Tabel 4.12	Efisiensi Belanja Daerah .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal.
Gambar 2.1	Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD .....	14
Gambar 2.2	Proses Penyusunan APBD .....	18
Gambar 2.3	Konversi Permendagri .....	31
Gambar 2.4	Kerangka Konseptual Penelitian .....	42
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta .....	60
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012 .....	61

STIE Widya Widwaha  
Jangan Plagiat

## DAFTAR HISTOGRAM

Nomor	Judul	Hal.
Histogram 4.1	PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012 .....	64
Histogram 4.2	Laporan Perhitungan Pendapatan .....	66
Histogram 4.3	Pertumbuhan Pendapatan .....	69
Histogram 4.4	Derajat Desentralisasi .....	71
Histogram 4.5	Kemandirian Keuangan .....	73
Histogram 4.6	Efektivitas Pajak Daerah .....	75
Histogram 4.7	Derajat Kontribusi BUMD .....	77
Histogram 4.8	Laporan Perhitungan Belanja .....	79
Histogram 4.9	Pertumbuhan Pendapatan .....	81
Histogram 4.10	Belanja Operasi dan Belanja Modal .....	83
Histogram 4.11	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung .....	85
Histogram 4.12	Efisiensi Belanja Daerah .....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2014
Lampiran 2	Surat Ijin Penelitian

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem pemerintahan bergaya sentralistis dianggap kurang menyentuh pada peningkatan kesejahteraan rakyat hanya menguntungkan pemerintah pusat, sedangkan daerah sebagai penghasil sumberdaya menerima dana dari pusat kurang signifikan. Sentralistis melahirkan korupsi di pemerintah pusat sedangkan pembangunan di daerah tidak merata. Masyarakat menghendaki sistem pemerintahan yang dapat merubah paradigma lama menuju paradigma baru yang mengarah pada upaya pemberdayaan kepada daerah. Merealisasikan tuntutan masyarakat yang semakin kuat, otonomi daerah merupakan tindakan nyata yang harus di tempuh untuk merubah sentralistis menuju desentralisasi (Halim 2010:131).

Dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan yang ada. Salah satu perubahan yang mendasar yang dimaksud adalah penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah (Mardiasmo dalam Ananda 2012:2).

Menurut Marizka (2009), Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Halim 2010:135).



Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu, Artinya APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (Marizka 2009).

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan. Beberapa peraturan pelaksanaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan APBD Tahun Anggaran 2015

Peraturan pemerintah yang berpayung hukum dengan undang-undang yang telah diamandemen tentu harus menyesuaikan dan atau mengalami perubahan atau revisi. Begitu juga dengan sistem pengelolaan keuangan daerah juga mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 misalnya mengalami perubahan yakni dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Akibatnya, peraturan yang lebih teknis juga mengalami revisi seperti Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian direvisi lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tidak merevisi secara total pengelolaan keuangan daerah pada aturan sebelumnya, melainkan hanya mempertegas dan memperjelas aturan teknis yang telah ada dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dikemudian hari aturan tersebut kemungkinan besar akan direvisi kembali seiring adanya perubahan pada standar akuntansi pemerintahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Halim2014:9). Lalu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 diganti dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran (Marizka 2009).

Teknik yang banyak digunakan untuk menganalisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Analisis Kinerja Pendapatan, Analisis Kinerja Belanja, Analisis Pembiayaan. Analisis Kinerja Pendapatan meliputi Analisis Varians Anggaran Pendapatan, Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, dan Derajat Kontribusi BUMD.

Analisis Kinerja Belanja terdiri dari Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja, Analisis Efisiensi Belanja. Dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan terjadi. Analisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah. Berdasarkan ringkasan tersebut Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa realisasi APBD di Kota Yogyakarta selama 5 tahun. Maka dari itu penulis membuat karya ilmiah dengan judul **“Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah yaitu sebagai berikut :

Bagaimana kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan selama periode 2010-2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengukur kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode 2010-2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini yaitu :

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Bagian Keuangan Kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### **E. Batasan Masalah Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terlalu luas penjabarannya maka penulis membatasi penelitian hanya meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini maka akan dibagi dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menerangkan tentang latar belakang permasalahan yang diambil, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan tentang penelitian terdahulu, dasar-dasar teori struktur APBD yang digunakan dalam penelitian yang melandasi teori tersebut dan studi-studi empiris lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan mengenai metode penelitian, objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data, serta alat analisis yang penulis terapkan pada penelitian.

#### **BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data dari hasil penelitian yang meliputi analisis deskriptif, perhitungan dan analisis.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir setelah dilakukan analisis.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teoritis**

##### **1. Keuangan Daerah**

###### **a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah**

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah dalam Halim 2014:25).

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem



pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, ruang lingkup keuangan daerah meliputi : a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; c. penerimaan daerah; d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

#### **b. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan anggaran daerah (APBD). APBD berisikan anggaran pendapatan yang antara lain adalah pendapatan asli daerah, dan Perimbangan, Anggaran Belanja mencakup antara lain Belanja Administrasi dan Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan pada saat dilaksanakan memerlukan alat pengendali, pelaporan, dan analisis yakni akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh (Halim 2010:89).

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah”.

Menurut Permendagri 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## **2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

### **a. Pengertian APBD**

Definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong dalam Halim (2002:16) Menurutnya, APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financieel workplan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan

eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga Daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Menurut Mahsun (2006:145), “Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter”. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret.

**b. Proses Penyusunan APBD**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan



Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD di mulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas Kebijakan Umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD. Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan lagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD, strategi dan plafon sementara yang telah ditetapkan pemerintah dan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan anggaran selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat

pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. UU Nomor 17 tahun 2003 tidak mengatur proses penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD. UU Nomor 17 tahun 2003 menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

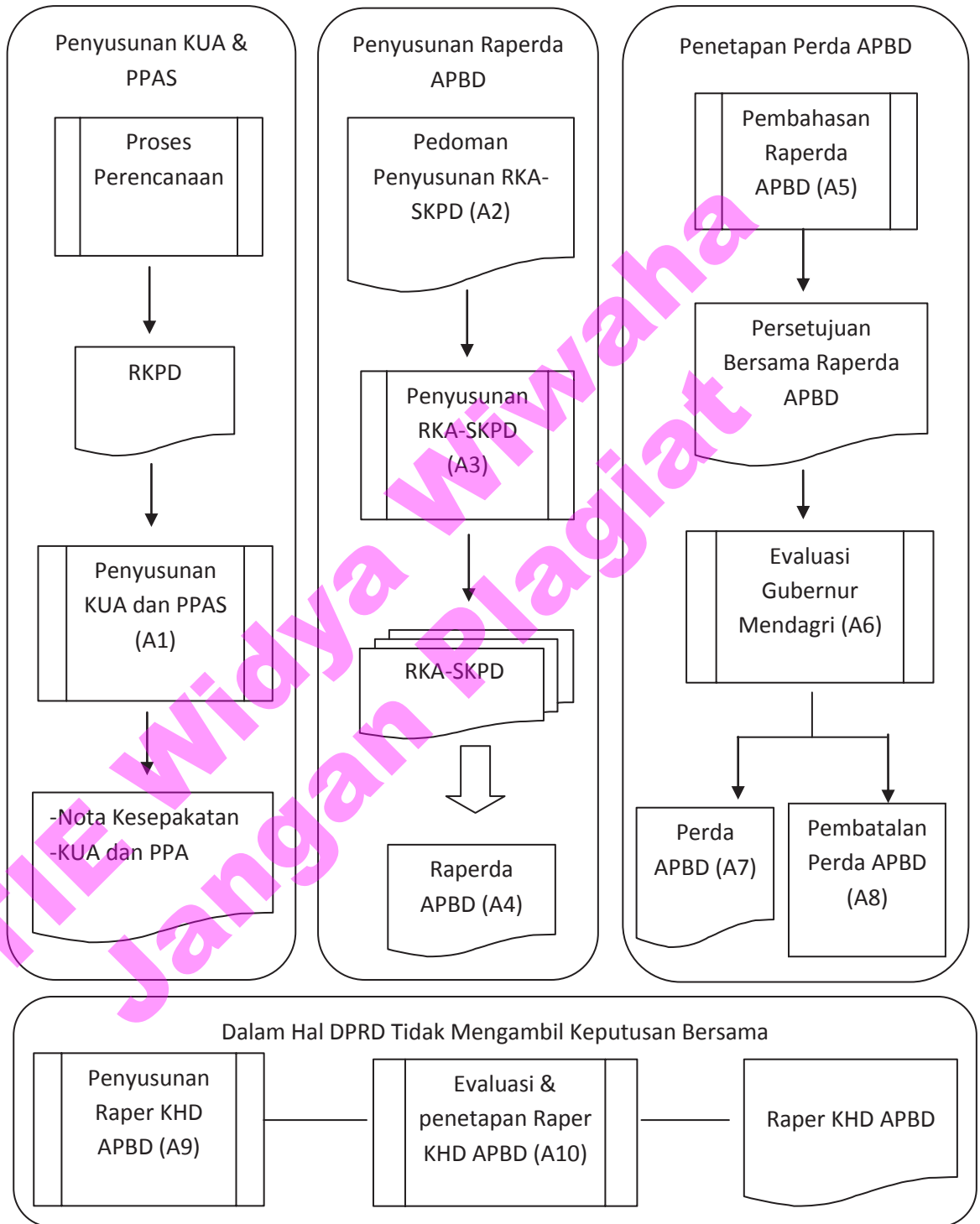
Setelah dokumen Rancangan Perda mengenai APBD tersusun, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Dalam pembahasan Perda, RAPBD, DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Berdasarkan Pasal 186 UU Nomor 32 tahun 2004, rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama tiga hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi

disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/ Walikota paling lama 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

STIE Widyia Widwaha  
Jangan Plagiat

**Gambar 2.2 Proses Penyusunan APBD**



Sumber : [www.noviantinurlaila.blogspot.com](http://www.noviantinurlaila.blogspot.com)



Proses Penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan sebuah Nota Kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut KHD menyampaikan Surat Edaran yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD-SKPD dengan melakukan penyusunan RKA-SKPD.

PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses Evaluasi. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika Mendagri/Gubernur menyatakan bahwa Perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Dalam kasus tertentu dimana DPRD tidak mengambil keputusan bersama, KHD dapat menyusun Peraturan KHD tentang APBD.

#### **c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Menurut Kebijakan Umum APBD Tahun 2015, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya

untuk periode satu tahun. KUA Kota Yogyakarta Tahun 2015 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KUA Kota Yogyakarta Tahun 2015 memuat kondisi ekonomi makro daerah asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2015 dituangkan dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2015 yang disusun dengan tahapan :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun 2015.

Mekanisme Penyusunan Kebijakan Umum APBD termuat dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 34 memiliki mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun
3. Kemudian Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya tersebut sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun anggaran berjalan

Secara teknis, proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

1. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pendanaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari
2. Rancangan KUA tersebut disusun oleh PPKD bersama pejabat perencana daerah dan pejabat SKPD lainnya sesuai dengan

kebutuhan yang diordinasikan oleh sekretaris daerah yang selanjutnya disebut tim anggaran pemerintah daerah

3. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selalu coordinator kepada kepala daerah paling lambat pada awal bulan Juni
4. Rancangan Kebijakan umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya
5. Rancangan Kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD untuk selanjutnya disepakati menjadi KUA

**d. Klasifikasi APBD**

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

## 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

### b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

### c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)
3. Penganggaran Dana Otonomi Khusus
4. Penganggaran Dana Intensif Daerah (DID)
5. Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan
6. Penganggaran Dana Transfer Lainnya
7. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi
8. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan
9. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam

negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud

10. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud
11. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, Objek dan rincian Objek pendapatan Dana Darurat

## **2. Belanja Daerah**

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk



meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

a. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

### 3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

#### b. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

##### 2. Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bungautang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### 3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

### 4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 5. Belanja Bagi Hasil Pajak

Belanja Bagi Hasil Pajak merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 6. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

#### 7. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

**Gambar 2.3: Konversi Permendagri No.13 Tahun 2006 ke PP No.24 Tahun 2005**

Permendagri No.13 Tahun 2006 BELANJA		PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung		A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai		1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga		2. Belanja Barang
3. Belanja Subsidi		3. Bunga
4. Belanja Hibah		4. Subsidi
5. Belanja Bantuan Sosial		5. Hibah
6. Belanja Bagi Hasil		6. Bantuan Sosial
7. Belanja Bantuan Keuangan		B. Belanja Modal
8. Belanja Tidak Terduga		1. Belanja Tanah
		2. Belanja Peralatan dan Mesin
B. Belanja Langsung		3. Belanja Gedung dan Bangunan
1. Belanja Pegawai		4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
2. Belanja Barang dan Jasa		5. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Modal		6. Belanja Aset Lainnya
		C. Belanja Tak Terduga
		1. Belanja Tak Terduga
		D. Transfer/ Bagi Hasil ke Desa
		1. Bagi Hasil Pajak
		2. Bagi Hasil Retribusi
		3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Sumber : Afiah, 2009

### 3. Surplus/Defisit APBD

a. Penerimaan Pembiayaan, semua penerimaan yang ditujukan untuk menutup defisit APBD:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
6. Penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan, semua pengeluaran yang ditujukan untuk memanfaatkan surplus APBD:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penerimaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah.

### 3. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mahsun (2006:25) "Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu

organisasi”. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dalam empat bagian yaitu (Mahmudi, 2007 dalam Marizka, 2009):

#### **1) Analisis Kinerja Pendapatan**

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara:

## 1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).



## 2. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

## 3. Analisis Rasio Keuangan

- Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya.

- Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Sama halnya dengan analisis efisiensi PAD, untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah diperlukan data tentang biaya pemungutan pajak.

- Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

## 2) Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD

secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis anggaran belanja dengan cara :

#### **1. Analisis Varians Belanja**

Analisis Varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan,

maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

## 2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

## 3. Analisis Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal.

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

- a. Analisis Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja
- b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
- c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

#### d. Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

### 4. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolute, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibanding tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

### 3) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Salah satu pos yang paling urgen dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besarnya SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran.

Dengan melihat kinerja pendapatan, kinerja belanja dan kinerja pembiayaan, maka dapat dinilai kinerja anggaran (APBD)

secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka yang sudah ditargetkan, maka dikatakan kinerja anggaran (APBD) adalah baik.

## **B. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian kinerja sudah banyak dilakukan, untuk mengetahui bagaimana Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota. Beberapa penelitian yang menjadi acuan dan referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Addina Marizka (2009) "Analisis Kinerja Pengelolaan APBD Kota Medan" yaitu Kinerja pendapatan pemerintah Kota Medan dilihat analisis varians, secara umum dapat dikatakan cukup baik meskipun belum terlampauinya target anggaran, dimana tahun 2003-2007 rata-ratanya hanya mencapai 96,59%. Kinerja belanja pemerintah Kota Medan dilihat dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Medan dapat dikatakan baik karena dari tahun 2003-2007 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2003-2007 yaitu dengan rata-rata sebesar 90,75%.

Untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk

mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan Kota Medan selama periode 2003-2007, dan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja dan pembiayaan Kota Medan selama periode 2003-2007.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Astriana Nabila Muhibtari (2014) "Analisis Rasio Keuangan APBD Kota Magelang untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012". Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja, APBD Kota Magelang selama tahun Anggaran 2008-2012 dan untuk menilai Kemampuan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang diukur melalui *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) selama Tahun Anggaran 2008-2012 yaitu perhitungan normatif dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif.

Kemandirian Pemerintah Kota Magelang berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Kemandirian Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012, berdasarkan pengolahan data yang

berasal dari Ringkasan Laporan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 adalah sebesar 16,860%. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Magelang masih belum ideal karena *Share* sebesar 10,918% dan *Growth* sebesar 604,530%.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Espinoza (2014) “Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisa pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya anggaran berbasis kinerja ternyata tidak memberikan peningkatan secara keseluruhan terhadap keuangan pemerintah Kota Medan, Namun sudah mengarah kepada peningkatan yang positif.

### C. Kerangka Konseptual Penelitian

**Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian**

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta



Laporan Realisasi APBD/Laporan Pertanggungjawaban



Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta

Sumber : Marizka, 2009



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Ada satu istilah lain yang erat kaitannya yaitu teknik, teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur. Penelitian merupakan suatu penyidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.

## **B. Objek Penelitian**

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka obyek penelitian difokuskan pada pemerintah daerah Kota Yogyakarta (beralamat di Jalan Kenari No.56 Yogyakarta 55165) yang bertujuan untuk mengukur Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu cara penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasi suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa di lebih-lebihkan. Penelitian deskriptif sering disebut sebagai noneksperimen, dikatakan demikian karena penelitian ini seseorang yang meneliti tidak melakukan manipulasi variabel dan juga selalu mengutamakan fakta, sehingga peneliti ini murni menjelaskan dan menggambarkannya.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulisan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya berupa data runtut waktu yaitu APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah dengan cara dokumentasi yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai obyek penelitian. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan data keuangan dan non keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Dokumen yang diperlukan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Yogyakarta tahun 2010 – 2014.

### **F. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dapat diukur dan dilakukan perhitungan serta perlu ditafsirkan agar menjadi suatu informasi yang dibutuhkan.

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini berdasarkan analisis rasio yang terdiri dari:

#### **1) Analisis Kinerja Pendapatan**

Sebagaimana diungkapkan oleh Marizka (2009) Dalam melakukan analisis pendapatan dapat dilakukan dalam bentuk rasio dengan menggunakan rumus :

1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan
2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

3. Analisis Rasio Keuangan

- a. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

(Ananda, 2012)

**Tabel 3.1 Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi**

<b>Kemampuan Desentralisasi</b>	<b>Rasio Derajat Desentralisasi (%)</b>
Sangat Baik	>50
Baik	25-50
Kurang Baik	10-25
Tidak Baik	<10

Sumber : Halim, 2007 dalam Sundari, 2015

b. Rasio Kemandirian Keuangan

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

(Priyastiw, 2005)

Pola hubungan dikaitkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut :

(Halim, 2001 dalam Afarahim, 2013)

1. Pola hubungan instruktif, dimana pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandiriannya sangat kurang. Daerah ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan urusan otonominya.
2. Pola hubungan konsultatif, pengarahan dan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang sedikit mampu untuk melaksanakan urusan otonominya.
3. Pola hubungan partisipatif, pengarahan dari pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya lebih tinggi. Daerah ini

diklasifikasikan sebagai daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya.

4. Pola hubungan delegatif, pemerintah pusat sangat mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam urusan otonomi, karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu mandiri. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mampu melaksanakan otonominya.

Pola hubungan tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

*Sumber : Halim, 2007 dalam Sundari, 2015*

c. Rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target pajak daerah}} \times 100\%$$

(Marizka, 2009)

Kriteria efektivitas adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti efektif
- Jika diperoleh sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektif berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti tidak efektif

(Bahri, 2011)

Sedangkan untuk rumus rasio efisiensi adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan pajak daerah}}{\text{Realisasi pajak daerah}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2010 dalam Afarahim, 2013)

Kriteria efisiensi adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti efisien
- Jika diperoleh sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efisien berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti tidak efisien

(Bahri, 2011)

## d. Derajat Kontribusi BUMD

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan bagian laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Priyastiwi, 2005)

## 2) Analisis Kinerja Belanja

1. Analisis Varians (Selisih Belanja)
2. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

(Marizka, 2009)

## 3. Analisis Keserasian Belanja

- a. Analisis Belanja dan Pembangunan terhadap Total Belanja

Rasio Belanja rutin

$$\text{terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Pembangunan

$$\text{terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

(Espinoza, 2014)



- b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Operasi terhadap

$$\text{Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal terhadap

$$\text{Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

(Ananda, 2012)

- c. Analisis Belanja Langsung dan tidak Langsung terhadap Total Belanja

Rasio Belanja langsung trhdp

$$\text{Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sementara itu, rasio Belanja Tidak Langsung dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Tdk} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Langsung trhdp Total Belanja

(Marizka, 2009)

4. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

(Ananda, 2012)

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta (bahasa Jawa : Hanacaraka) adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubawana dan Adipati Paku Alam. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar ketiga di wilayah Pulau Jawa bagian Selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Salah satu kecamatan di Yogyakarta, yaitu Kotagede pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1575-1640. Keraton (Istana) yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya adalah Keraton Yogyakarta dan Puro Paku Alaman, yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram.

Nama Yogyakarta terambil dari dua kata, yaitu Ayogya atau “Ayodhya” yang berarti “kedamaian” (atau tanpa perang, a “tidak”, yogya merujuk pada yodya atau yudha yang berarti “perang”), dan Karta yang berarti “baik”. Ayodhya merupakan kota yang bersejarah di India dimana wiracarita Ramayana terjadi. Tapak keraton Yogyakarta sendiri menurut babad (misalnya Babad Giyanti) dan *leluri* (riwayat oral) telah berupa sebuah *dalem* yang bernama Dalem Gerjiwati, lalu dinamakan ulang oleh Sunan

Pakubuwana II sebagai Dalem Ayogya  
([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Yogyakarta](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta)).

DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam peyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian Tengah. Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>) dan merupakan wilayah dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DIY secara astronomis terletak antara 7°33' - 8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Sementara itu, dilihat dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah pulau Jawa bagian Selatan dan berbatasan dengan beberapa provinsi di Jawa Tengah, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Magelang sebelah Timur dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri, sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.

Kemiringan Lahan di DIY dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km<sup>2</sup>, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km<sup>2</sup>. Luas wilayah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara umum terbagi ke dalam beberapa karakter topografis. Sebagian besar dari luas wilayah DIY,

yaitu sebesar 65,65 % wilayah terletak pada ketinggian kurang dari 100 mdpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 mdpl, dan 0,47% wilayah dengan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl (Rancangan RKPD Tahun 2016).

DIY terdiri dari berbagai ekosistem yang kompleks antara lain gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudera Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut: (Rancangan RKPD Tahun 2016)

- Satuan Pegunungan Selatan, seluas  $\pm 1.656,25$  km<sup>2</sup>, ketinggian 150-700m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
- Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas  $\pm 582,81$  km<sup>2</sup> ketinggian 80-2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.

- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas  $\pm 215,62 \text{ km}^2$ , ketinggian 0-80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumpuk pasir;
- Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas  $\pm 706,25 \text{ km}^2$ , ketinggian 0-572 m terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Secara administratif, DIY terdiri atas empat Kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, yaitu: (Rancangan RKPD Tahun 2016)

- a. Kabupaten: Kulonprogo, Ibukota : Wates, Kecamatan : 12, Kelurahan : 88
- b. Kabupaten : Bantul, Ibukota : Bantul, Kecamatan : 17, Kelurahan : 75
- c. Kabupaten : Gunungkidul, Ibukota : Wonosari, Kecamatan : 18, Kelurahan : 144
- d. Kabupaten : Sleman, Ibukota : Sleman, Kecamatan : 17, Kelurahan : 86

- e. Kabupaten : Kota Yogyakarta, Ibukota : Yogyakarta, Kecamatan : 14, Kelurahan : 45
- f. Kabupaten : DIY, Ibukota : Yogyakarta, Kecamatan : 78, Kelurahan : 438

Secara Demografis, Kota Yogyakarta rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY relatif rendah. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk DIY tercatat sebesar 0,82% turun dari tahun 2010 yang sebesar 1,02%. Rendahnya laju pertumbuhan tak lepas dari keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan kelahiran seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut wilayah, hampir seluruh kabupaten/kota di DIY mengalami pertumbuhan penduduk yang positif. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Kulonprogo sebesar 0,56% dan tertinggi berada di Kabupaten Sleman, yaitu 0,99%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dan Bantul dimungkinkan karena pergeseran lokasi perguruan tinggi ke arah kedua Kabupaten tersebut sehingga banyak pendatang baru yang datang untuk belajar di DIY yang kemudian tinggal di kedua Kabupaten tersebut. Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Sleman dan Bantul tersebut juga disebabkan oleh semakin jenuhnya Kota Yogyakarta untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman sehingga banyak penduduk yang memilih bermukim di daerah penyangga kota. Luas wilayah mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun

2012, Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai wilayah terluas dengan jumlah penduduk 684.740 orang (19,48%) tercatat sebagai Kabupaten berkepadatan penduduk terendah, yaitu 461 orang/km<sup>2</sup> sedangkan kota Yogyakarta yang memiliki wilayah terkecil dengan jumlah penduduk 394.012 orang (11,12%) tercatat sebagai wilayah DIY yang berkepadatan penduduk tertinggi yaitu 12.123 orang/km<sup>2</sup> (Rancangan RKPD Tahun 2016).

Secara ekonomis, pariwisata merupakan sektor utama bagi DIY. Banyaknya objek, dan daya tarik wisata di DIY telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Pada 2010 tercatat kunjungan wisatawan sebanyak 1.456.980 orang, dengan rincian 152.843 dari mancanegara, dan 1.304.137 orang dari nusantara. Bentuk wisata di DIY meliputi wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti resort, hotel, dan restoran. Tercatat ada 37 hotel berbintang, dan 1.011 hotel melati di seluruh DIY pada 2010. Adapun penyelenggaraan MICE sebanyak 4.509 kali per tahun atau sekitar 12 kali per hari. Keanekaragaman upacara keagamaan, dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreativitas seni, dan keramah tamahan masyarakat, membuat DIY mampu menciptakan produk-produk budaya, dan pariwisata yang menjanjikan. Pada tahun 2010 terdapat 91 desa wisata dengan 51 di antaranya yang layak dikunjungi. Tiga desa wisata

di Kabupaten Sleman hancur terkena erupsi gunung Merapi sedang 14 lainnya rusak ringan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta pada September 2014, angka kunjungan mencapai 2,4 juta wisatawan domestik dan 1,8 juta wisatawan mancanegara.

Secara geografis, DIY juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi objek wisata yang terjangkau, dan mudah ditempuh. Sektor pariwisata sangat signifikan menjadi motor kegiatan perekonomian DIY yang secara umum bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu: jasa-jasa, perdagangan, hotel, dan restoran, serta pertanian. Dalam hal ini pariwisata member efek pengganda (*multiplier effect*) yang nyata bagi sektor perdagangan disebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja, dan sumbangan terhadap perekonomian daerah sangat signifikan (Daerah Istimewa Yogyakarta\_Wikipedia bahasa Indonesia,ensiklopedia bebas).

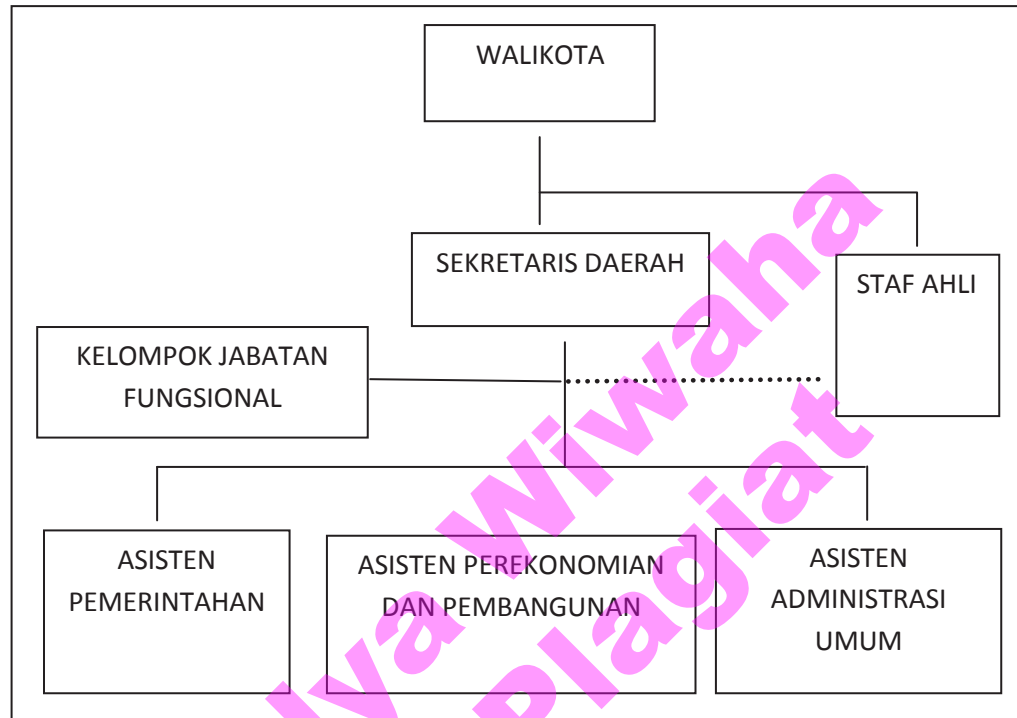
Secara Sosial, kondisi sosial yang terbagi atas pendidikan, kesehatan, kemiskinan, keamanan dan ketertiban, agama dan lainnya merupakan faktor penunjang dan penghambat bagi pertumbuhan ekonomi kota Yogyakarta. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pengembangan kota yang sifatnya kompleks dan multi dimensional yang fenomenanya di pengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, gender, dan kondisi lingkungan (Marizka,2009).



Sebagai salah satu daerah otonom, kedudukan, fungsi, dan peranan Kota Yogyakarta cukup penting dan strategis secara regional. Masing-masing daerah otonom pada dasarnya memiliki pemerintahan daerah. Adanya pemerintahan daerah berkonsekuensi adanya Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah Walikota Yogyakarta beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara garis besar struktur organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, dapat digambarkan sebagai berikut:

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta**



Sumber : [www.e-journal.uajy.ac.id](http://www.e-journal.uajy.ac.id)

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwa Walikota sebagai pemimpin tertinggi dalam organisasi membawahi Sekretaris Daerah dan Staf Ahli. Untuk mempermudah birokrasi dan pelayanan, Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum dibagi atas tiga asisten pembantu utama yang membawahi berbagai macam instansi, yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Masing-masing instansi di dalam Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan seluruhnya wajib dilaporkan dan diketahui oleh Walikota sebagai pimpinan tertinggi dari seluruh instansi.

## B. Gambaran Perekonomian dan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta

Kerangka Ekonomi Makro Daerah memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini menggambarkan besaran output akhir atau nilai tambah yang dihasilkan melalui produksi daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah Kota Yogyakarta. Skala ekonomi wilayah meningkat dari 4,77 triliun rupiah di tahun 2007 menjadi 6,15 triliun rupiah tahun 2012.

**Gambar 4.2**

### **Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012**



*Sumber : Kebijakan Umum APBD 2015*

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang bertumpu pada sektor sekunder dan tersier dalam kegiatan ekonominya. Kontributor PDRB terbesar

adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran lalu diikuti dengan sektor jasa. Majunya sektor perdagangan, hotel, dan restoran tersebut tidak terlepas dari kegiatan pariwisata dan budaya yang memang menjadi kekuatan dari Kota Yogyakarta. Kegiatan industri dengan hasil produk yang dipasarkan ke dalam dan luar negeri juga menjadi penopang kegiatan perdagangan. Komitmen Pemerintah Kota untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga kota menyebabkan kegiatan jasa menjadi salah satu kontributor PDRB terbesar.

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2007-2012 mencapai 5,19% per tahun. Adanya pertumbuhan ekonomi ini berarti ada peningkatan produksi dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta. Laju pertumbuhan masing-masing sektor menunjukkan angka dari -1,43% (sektor industri pengolahan) hingga 8,02% (sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan). Empat sektor yang memberikan kontribusi terbesar (81,02%) terhadap kenaikan PDRB tersebut yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektor keuangan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat ditunjukkan dengan PDRB per kapita, meskipun angka ini tidak menjelaskan adanya tingkat distribusi pendapatan penduduk. PDRB perkapita Kota Yogyakarta dari tahun 2009-2012 mengalami kenaikan dari Rp 10.607.237,00 menjadi Rp 14.327.563,00.

Kenaikan PDRB perkapita ini menunjukkan adanya peringatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

**Tabel 4.1 PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012**

Indikator	2008	2009	2010	2011**	2012***
Nilai PDRB (juta Rp)	5.021.148	5.244.851	5.505.492	5.816.568	6.151.679
Jumlah penduduk (jiwa)	456.915	389.685	388.627	390.553	394.012
PDRB Perkapita ADHK (Rp/jiwa) Kota Yogyakarta	10.989.241	13.687.232	14.177.198	14.893.121	15.612.924
PDRB Perkapita ADHK (Rp/jiwa) Provinsi DIY	5.538.108	5.855.379	6.086.507	6.345.750	6.631.806

*Sumber : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015*

Keterangan : \* angka sementara  
 \*\* angka sangat sementara  
 \*\*\* angka sangat-sangat sementara  
 x tahun 2012 hasil proyeksi penduduk

Dari tabel di atas dapat di buat histogram sebagai berikut:

**Histogram 4.1 PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012**



*Sumber : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015*

PDRB Kota Yogyakarta pada Tahun 2014 diperkirakan tetap tumbuh sekitar 4,99-5,85 persen dimana pertumbuhan PDRB akan tetap didominasi pada sektor jasa-jasa kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Pada tahun 2011 dan 2012 banyak di bangun hotel-hotel di Kota Yogyakarta yang diharapkan akan menyumbang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan, peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki beberapa sumber

pendapatan pokok, yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebagai daerah yang perkembangan ekonominya sangat didominasi sektor sekunder dan tersier, sumber pendapatan asli daerah sebagian besar diperoleh dari hasil pajak dan retribusi daerah.

### **C. Perhitungan dan Analisis Kinerja Pengelolaan APBD**

#### **1) Analisis Kinerja Pendapatan**

Dengan menggunakan data APBD dan Realisasi APBD, dilakukan Analisis Pendapatan dengan menggunakan cara analisis :

##### **1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan**

Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

**Tabel 4.2**  
**Laporan Perhitungan Pendapatan**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2010	818.052.316.985	815.495.924.651,51	99,69 %
2011	917.982.098.731	951.681.432.622,59	103,67 %
2012	1.088.827.758.053	1.157.578.918.317,01	106,31 %
2013	1.283.706.256.200	1.309.580.194.014,42	102,02 %
2014	1.210.102.185.890	1.459.742.435.083,81	120,63 %
Rata-Rata			106,46 %

*Sumber :Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel di atas dapat dibuat histogram sebagai berikut:

**Histogram 4.2**  
**Laporan Perhitungan Pendapatan**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**



*Sumber :Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*



Dari tabel dan histogram di atas berdasarkan analisis varians dapat dilihat bahwa kinerja pendapatan Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik karena tercapainya target yang dianggarkan ditunjukkan dari tahun 2011-2014 yaitu sebesar 103,67%, 106,31 %, 102,02% dan 120,63%.

Dari sisi komponen pendapatan daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 selalu memenuhi target yang dianggarkan yaitu sebesar 102,2%, 112,28%, 119,52%, 108,11%,116,42%. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu dengan persentase 100% dari tahun 2010-2012, namun pada tahun 2013 turun yaitu sebesar 99,87% lalu naik pada tahun 2014 sebesar 111,89%. Sedangkan dari komponen Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan yaitu sebesar 98,83%, 101,39%, 101,56%, 99,69% dan 122,74%. Pada komponen lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu 106,03%, 98,06%, 110,90%, 100%.

## 2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Pertumbuhan Pendapatan**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

Tahun	PAD	Persentase	Total Pendapatan	Persentase
2010	179.423.640.057,51	11,12%	815.495.924.651,51	8,73%
2011	228.870.559.645,59	27,56%	951.681.432.622,59	16,70%
2012	338.283.728.285,01	47,81%	1.157.578.918.317,01	21,64%
2013	383.052.140.420,42	13,23%	1.309.580.194.014,42	13,13%
2014	470.641.528.444,03	22,87%	1.459.742.435.083,81	11,47%
Rata-rata		24,52%		14,33%

*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel di atas dapat dibuat histogram sebagai berikut:

**Histogram 4.3**  
**Pertumbuhan Pendapatan**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**



*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel perhitungan dan histogram di atas, kinerja anggaran dari analisis pertumbuhan pendapatan dan PAD Kota Yogyakarta cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang positif yaitu 24,52%. Kecenderungan pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 34,58%.

### 3. Analisis Rasio Keuangan

#### a. Derajat Desentralisasi

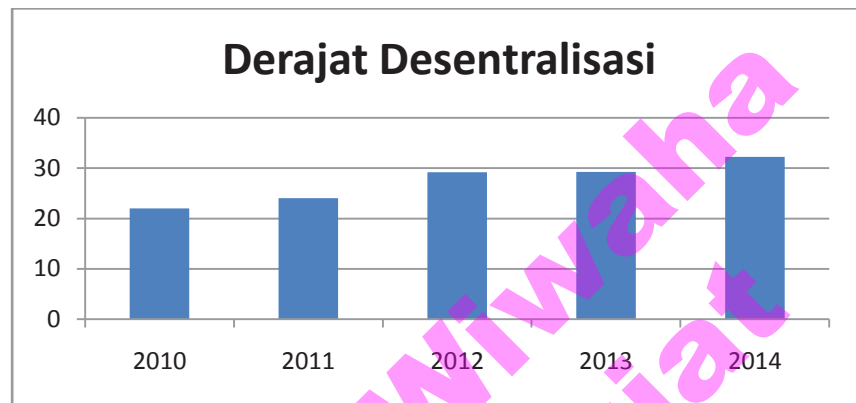
**Tabel 4.4**  
**Derajat Desentralisasi**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria Rasio
2010	179.423.640.057,51	815.495.924.651,51	22%	Baik
2011	228.870.559.645,59	951.681.432.622,59	24,05%	Baik
2012	338.283.728.285,01	1.157.578.918.317,01	29,22%	Baik
2013	383.052.140.420,42	1.309.580.194.014,42	29,25%	Baik
2014	470.641.528.444,03	1.459.742.435.083,81	32,24%	Baik
Rata-rata			27,35%	Baik

*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel di atas dapat dibuat histogram sebagai berikut:

**Histogram 4.4**  
**Derajat Desentralisasi**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**



*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa derajat desentralisasi Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2010-2014 yaitu 27,35%. Ini berarti kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Yogyakarta masih harus menggali dan mengelola lagi pendapatannya. Untuk itu kedepannya Kota Yogyakarta harus lebih berupaya untuk dapat meningkatkan PADnya dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada.

**b. Kemandirian Keuangan Daerah**

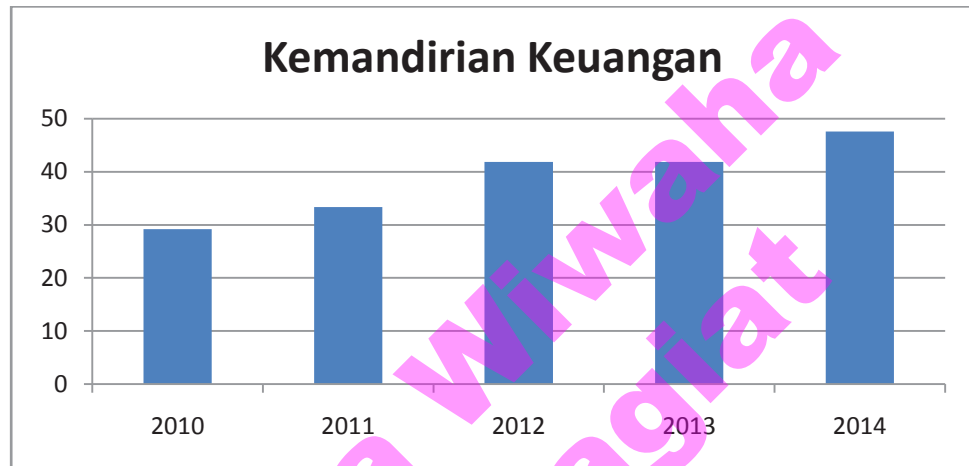
**Tabel 4.5**  
**Kemandirian Keuangan**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Bantuan Pemerintah pusat/provinsi</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
2010	179.423.640.057,51	614.973.004.594	29,18%	Konsultatif
2011	228.870.559.645,59	686.260.682.977	33,35%	Konsultatif
2012	338.283.728.285,01	808.714.790.032	41,83%	Konsultatif
2013	383.052.140.420,42	914.763.053.594	41,87%	Konsultatif
2014	470.641.528.444,03	989.100.906.639,78	47,58%	Konsultatif
Rata-rata			38,76%	Konsultatif

*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel di atas dapat dibuat histogram sebagai berikut:

**Histogram 4.5**  
**Kemandirian Keuangan**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**



*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa kemandirian keuangan Kota Yogyakarta masih rendah dan mempunyai kecenderungan meningkat. Rata-rata rasio kemandirian yaitu hanya 38,76%. Ini berarti pengurangan dan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang sedikit mampu untuk melaksanakan urusan otonominya.

c. Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Tabel 4.6**  
**Efektivitas Pajak Daerah**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

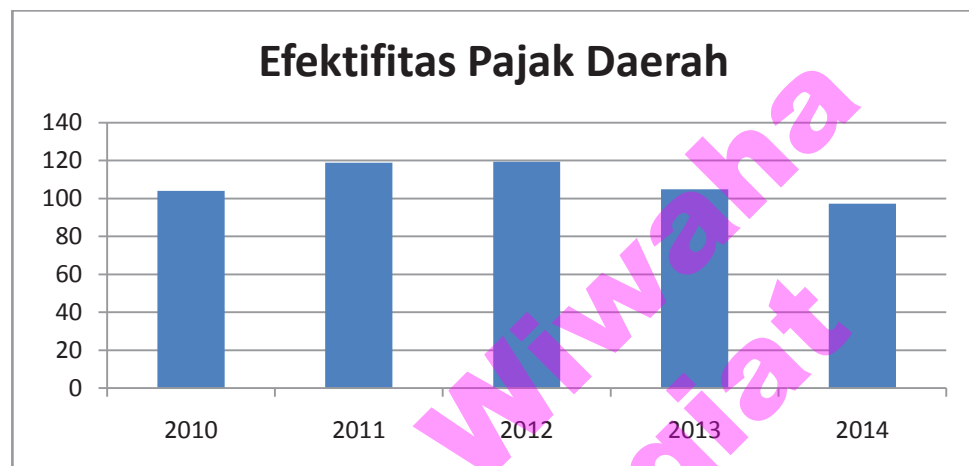
Tahun	Pajak Daerah		Rasio Efektivitas	Kriteria Efektifitas
	Anggaran	Realisasi		
2010	75.200.000.000	78.254.579.242	104,06%	Tidak Efektif
2011	101.349.000.000	120.457.515.127	118,85%	Tidak Efektif
2012	173.905.500.000	207.703.488.739,72	119,43%	Tidak Efektif
2013	217.017.475.838	227.748.852.911	104,94%	Tidak Efektif
2014	260.582.494.000	253.461.936.189	97,27%	Efektif
Rata-rata			108,91%	Tidak Efektif

*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*



Dari tabel di atas dapat dibuat histogram sebagai berikut:

**Histogram 4.6**  
**Efektivitas Pajak Daerah**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**



*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel perhitungan dan histogram di atas dapat dikatakan bahwa Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta tidak efektif karena dalam merealisasikan pajak daerah melampaui yang sudah dianggarkan yaitu rata-ratanya 108,91% berarti lebih dari 100%.

**d. Derajat Kontribusi BUMD**

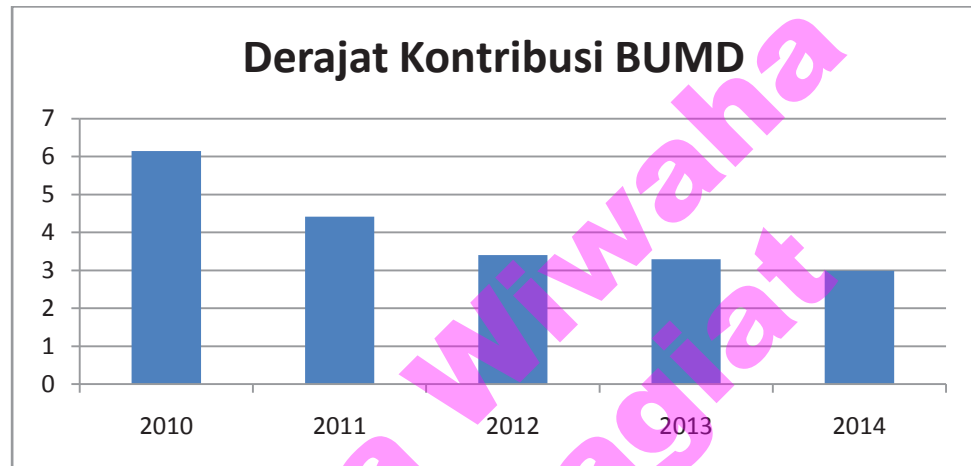
**Tabel 4.7**  
**Derajat Kontribusi BUMD**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Bagian Laba BUMD</b>	<b>Penerimaan PAD</b>	<b>Derajat Kontribusi BUMD</b>
2010	11.031.304.700,40	179.423.640.057,51	6,15%
2011	10.121.339.866,01	228.870.559.645,59	4,42%
2012	11.496.627.185,59	338.283.728.285,01	3,40%
2013	12.596.415.894,77	383.052.140.420,42	3,29%
2014	14.087.531.070,13	470.641.528.444,03	2,99%
Rata-rata			4,05%

*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel di atas dapat dibuat histogram sebagai berikut:

**Histogram 4.7**  
**Derajat Kontribusi BUMD**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**



*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel perhitungan dan histogram Derajat Kontribusi BUMD di atas menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah mampu memberikan kontribusi bagi PAD Kota Yogyakarta hanya sebesar 4,05%. Hal ini menggambarkan dari tahun 2010-2014 Perusahaan daerah kontribusi BUMD masih sangat kecil. Untuk itu sangat diharapkan kedepannya BUMD dapat lebih berusaha untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi PAD sehingga PAD Kota Yogyakarta dapat lebih meningkat.

## 2) Analisis Kinerja Belanja

### 1. Analisis Varians Belanja

**Tabel 4.8**  
**Laporan Perhitungan Belanja**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2010	917.054.170.180	839.866.480.661,43	91,58%
2011	990.788.116.640	932.018.507.343,03	94,07%
2012	1.146.288.393.816	1.023.803.006.143,51	89,31%
2013	1.377.414.820.394	1.232.911.934.134,18	89,51%
2014	1.422.093.336.380	1.336.610.467.867,75	93,99%
Rata-rata			91,69%

*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel di atas dapat dibuat histogram sebagai berikut:

**Histogram 4.8**  
**Laporan Perhitungan Belanja**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**



Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Berdasarkan analisis varians secara umum kinerja belanja Kota Yogyakarta dapat dikatakan cukup baik karena realisasinya tidak melebihi yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2010-2014 yaitu sebesar 91,58%, 94,07%, 89,31%, 89,51%, 93,99%. Realisasi belanja daerah yang paling rendah terjadi pada tahun 2012. Apabila seluruh kegiatan yang direncanakan telah terlaksana, ini menunjukkan telah terjadinya pengendalian anggaran yang ketat yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kota Yogyakarta, maka hal ini merupakan suatu prestasi bagi Kota Yogyakarta.

## 2. Analisis Pertumbuhan Belanja

**Tabel 4.9**  
**Pertumbuhan Belanja**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

Tahun	Belanja Daerah	Tingkat Pertumbuhan
2010	839.866.480.661,43	7,15%
2011	932.018.507.343,03	10,97%
2012	1.023.803.006.143,51	9,85%
2013	1.232.911.934.134,18	20,42%
2014	1.336.610.467.867,75	8,41%
Rata-rata		11,36%

*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel di atas dapat dibuat histogram sebagai berikut:

**Histogram 4.9**  
**Pertumbuhan Belanja**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**



*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel dan histogram diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan belanja Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kecenderungan pertumbuhan belanja Kota Yogyakarta fluktuatif terlihat dari tahun 2010-2014 pertumbuhan berturut-turut yaitu sebesar 7,15%, 10,97%, 9,85%, 20,42%, 8,41%. Sedangkan rata-ratanya yaitu sebesar 11,36%.

### 3. Analisis Keserasian Belanja

#### a. Analisis Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Total Belanja

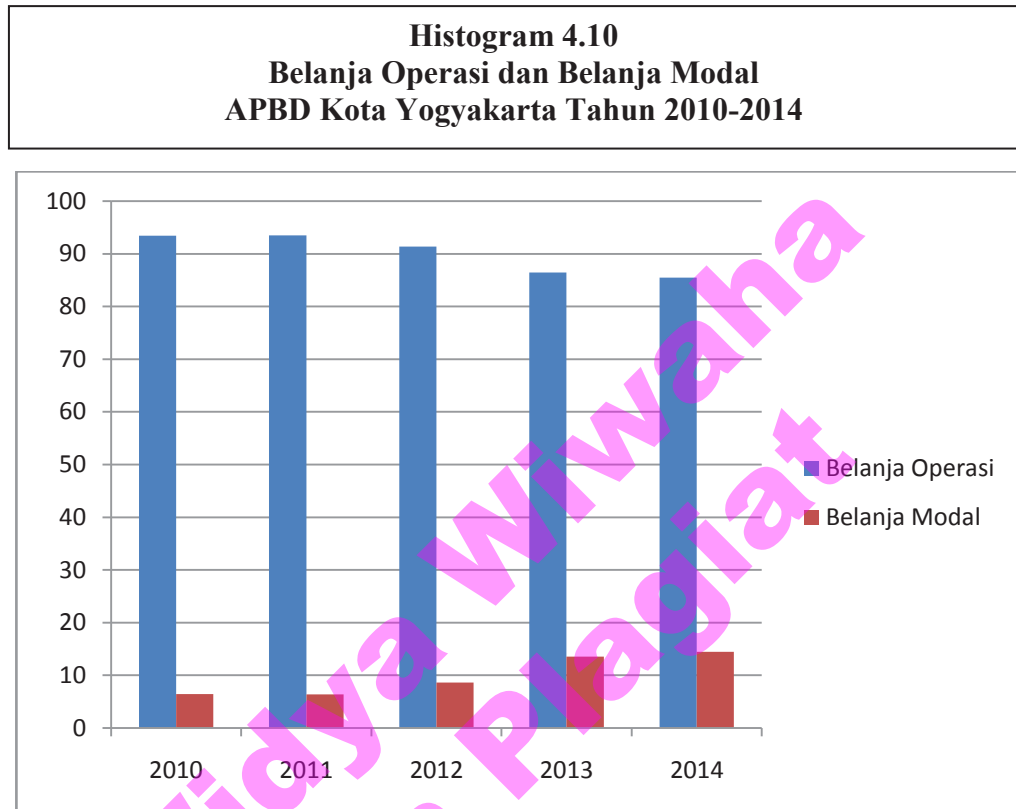
**Tabel 4.10**  
**Belanja Operasi dan Belanja Modal**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

Tahun	Total Belanja Operasi/Total Belanja	Total Belanja Modal/Total Belanja	% Rasio	
2010	<u>784.516.524.448,43</u> 839.866.480.661,43	<u>54.040.432.205</u> 839.866.480.661,43	93,41%	6,43%
2011	<u>871.414.704.666,03</u> 932.018.507.343,03	<u>59.151.111.077</u> 932.018.507.343,03	93,50%	6,35%
2012	<u>935.210.038.805,71</u> 1.023.803.006.143,51	<u>88.335.891.337,80</u> 1.023.803.006.143,51	91,35%	8,63%
2013	<u>1.065.813.030.045,18</u> 1.232.911.934.134,18	<u>167.079.742.204</u> 1.232.911.934.134,18	86,45%	13,55%
2014	<u>1.142.988.276.601,75</u> 1.336.610.467.867,75	<u>193.078.279.594</u> 1.336.610.467.867,75	85,51%	14,45%
Rata-rata			90,04%	9,88%

*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*



Dari tabel di atas dapat dibuat histogram sebagai berikut:



*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Berdasarkan tabel perhitungan dan histogram diatas dapat diketahui bahwa dari kelima tahun tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta sangat memprioritaskan belanjanya untuk belanja operasi. Dengan persentase masing-masing adalah 93,41%, 93,50%, 91,35%, 86,45%, 85,51% sedangkan untuk belanja modal masing-masing sebesar 6,43%, 6,35%, 8,63%, 13,55%, 14,45%. Dalam arti bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta lebih memprioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan, sedangkan untuk

pembangunan daerahnya masih sangat kecil. Hal tersebut sangat tidak baik, dikarenakan harusnya Pemerintah Kota Yogyakarta lebih mementingkan untuk pembangunan di daerahnya atau setidaknya seimbang antara kedua belanja tersebut.

**b. Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja**

**Tabel 4.11**  
**Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

Tahun	Total Belanja		% Rasio	
	Langsung	Tidak Langsung	Langsung	Tidak Langsung
2010	304.402.335.119	535.464.145.542,43	36,24%	63,76%
	839.866.480.661,43	839.866.480.661,43		
2011	324.007.261.062	608.011.246.281,03	34,76%	65,24%
	932.018.507.343,03	932.018.507.343,03		
2012	413.843.791.840,80	609.959.214.302,71	40,42%	59,58%
	1.023.803.006.143,51	1.023.803.006.143,51		
2013	599.584.176.460	633.327.757.674,18	48,63%	51,37%
	1.232.911.934.134,18	1.232.911.934.134,18		
2014	674.551.333.203	662.059.134.664,75	50,47%	49,53%
	1.336.610.467.867,75	1.336.610.467.867,75		
Rata-rata			42,10%	57,90%

*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel di atas dapat dibuat histogram sebagai berikut:

**Histogram 4.11**  
**Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**



*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel dan histogram diatas dapat terlihat bahwa untuk tahun 2010-2014 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sehingga rasio belanja langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu sebesar 42,10% sedangkan rasio belanja tidak langsung 57,90%.

#### 4. Rasio Efisiensi Belanja

**Tabel 4.12**  
**Efisiensi Belanja Daerah**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>
2010	917.054.170.180	839.866.480.661,43	91,58%
2011	990.788.116.640	932.018.507.343,03	94,07%
2012	1.146.288.393.816	1.023.803.006.143,51	89,31%
2013	1.377.414.820.394	1.232.911.934.134,18	89,51%
2014	1.422.093.336.380	1.336.610.467.867,75	93,99%
Rata-rata			91,69%

*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel di atas dapat dibuat histogram sebagai berikut:

**Histogram 4.12**  
**Efisiensi Belanja Daerah**  
**APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014**



*Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)*

Dari tabel perhitungan diatas terlihat bahwa pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2010-2014 berada dibawah 100%, dengan rata-rata 91,69%. Ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta baik.

### 3) Analisis Pembiayaan

Salah satu pos yang paling urgen untuk dianalisis dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).Makin besarnya SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran atau dengan kata lain realisasi SILPA tidak melebihi dari yang sudah dianggarkan yaitu dari tahun 2010-2014 sebesar 100%.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari analisis varians, secara umum dapat dikatakan baik karena terlampauinya target anggaran, dimana dari tahun 2010-2014 rata-ratanya mencapai 106,46%.
2. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan Pendapatan dan PAD yang positif yaitu 24,52% dan 14,33%. Pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan, sementara itu pertumbuhan pendapatan cenderung fluktuatif.
3. Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik dengan rata-rata pada tahun 2010-2014 yaitu 27,35%; Kemandirian keuangan Kota Yogyakarta masih rendah dan mempunyai kecenderungan meningkat dengan rasio kemandirian rata-rata yaitu hanya 38,76%. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta tidak efektif dalam

merealisasikan pajak daerah yang direncanakan, dengan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah yaitu 108,91%; derajat kontribusi BUMD terhadap PAD masih sangat kecil yaitu sebesar 4,05%.

4. Kinerja belanja pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik, karena dari tahun 2010-2014 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2010-2014 yaitu dengan rata-rata sebesar 91,69%.
5. Pertumbuhan belanja Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 11,36% dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif.
6. Untuk tahun 2010-2014, Pemerintah Kota Yogyakarta sangat memprioritaskan belanjanya untuk belanja operasi yaitu sebesar 90,04%, sedangkan untuk belanja modal yaitu sebesar 9,88%. Sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sehingga rasio belanja langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu sebesar 42,10% sedangkan rasio belanja tidak langsung 57,90%.
7. Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dikatakan baik karena telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2010-2014 berada dibawah 100%, dengan rata-rata 91,69%.
8. Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dari analisis pembiayaan secara umum sudah terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti



pemerintah Kota Yogyakarta sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta
  - a. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya dengan mempertimbangkan tingkat kemandirian keuangan daerahnya yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta wewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Provinsi, Agar bisa lebih mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
  - b. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu merealisasikan pajak daerahnya agar pajak daerahnya dapat digunakan lebih efektif dan sesuai dengan anggarannya dengan cara merinci atau membuat daftar biaya yang berhubungan dengan pajak agar pajak yang dipungut sesuai dengan yang biaya yang digunakan.

c. Diharapkan kedepannya BUMD dapat lebih berusaha untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi PAD sehingga PAD Kota Yogyakarta dapat lebih meningkat. Dengan cara antara lain :

1. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus bayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran
2. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan PAD oleh aparatur
4. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan, dan lain sebagainya

d. Pemerintah Kota Yogyakarta disarankan agar lebih memprioritaskan belanja modal untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak bersumber dari masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan

retribusi daerah, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian agar analisis terhadap kinerja pemerintah mendapatkan gambar kinerja pemerintah yang jelas.
- b. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah.

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## DAFTAR PUSTAKA

- Afarahim.(2013).*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indagiri Hilir Periode 2005-2010* (Tugas Akhir).Jakarta : Universitas Terbuka Jakarta.
- Afiah,Nunuy Nur.(2009).*Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana.
- Ananda,Citra.Widyatmini.(2012).*Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009-2011*.Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Banten : Universitas Gunadarma.
- Astuti,Fibry.(2015).*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten GunungKidul Tahun Anggaran 2010-2013*.Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Yogyakarta : Fakultas Ekonomi STIE Widya Wiwaha.
- Bahri, Samsul.(2011). *Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009*.Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan).Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Espinoza.(2014). *Pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*.Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Halim,Abdul.(2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*.Edisi Pertama.Jakarta : Salemba Empat.
- Halim,Abdul.(2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama.Yogyakarta : UPP STIM YKP.
- Halim,Abdul. Muhammad Syam Khusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4.Jakarta : Salemba Empat.
- <http://www.jogjakota.go.id>. “Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015”. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2015, pukul 17:51:50.
- <http://www.keuda.kemendagri.go.id>. “Proses Penyusunan APBD”.Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015, pukul 16:00:05.
- <http://www.seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2013/08/html>.“Pengertian Penelitian Deskriptif”. Diunduh pada tanggal 11 Oktober 2015, pukul 22:00:05.

<http://www.yusranlapananda.wordpress.com/2015/01/04>. “Keuangan negara keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah bagian 2”. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2015, pukul 19:49:10.

<http://www.noviantinurlaila.blogspot.com>. “Proses Penyusunan APBD”. Diunduh pada tanggal 20 November 2015 pukul 17:30:15.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Yogyakarta](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta). “Gambaran umum Kota Yogyakarta”. Diunduh pada tanggal 25 November 2015 pukul 18:30:10.

<http://www.bappeda.jogjaprov.go.id>. “Rancangan RKPD 2016 Final”. Diunduh pada tanggal 22 November 2015 pukul 20:00:15.

<http://www.e-journal.uajy.ac.id>. “Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta”. Diunduh pada tanggal 26 November 2015 pukul 19:30:15.

<http://www.GoresanItem.com>. “Pengertian Metode dan Metodologi Penelitian”. Diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 pukul 21:28:05.

Mahsun, Mohammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPF.

Marizka, Addina. (2009). *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Medan : Universitas Sumatera Utara.

Maulida, Ananda Farah. (2012). “Analisis Komparatif Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pengalihan PBB-P-2 Menjadi Pajak Daerah di Kab/Kota Seluruh Indonesia”.

Muhibtari, Astriana Nabila. 2014. *Analisis Rasio Keuangan APBD Kota Magelang untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah 58 thn 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2014 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 *tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

-----, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

-----, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

-----, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Sundari.Suprantiningrum.(2015). “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Di Era Otonomi Daerah”.*Media Ekonomi dan Manajemen*.Vol 30,34,36.

Syahputra,Rai Kresnawan.(2015). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2013*.Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Yogyakarta : Fakultas Ekonomi STIE Widya Wiwaha.

Priyastiwi.Mohammad Mahsun.(2005).“Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi”.*Kajian Bisnis*.Vol. 13,213.

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat